

## **Implementasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kota Surabaya**

<sup>1</sup>Levina Linadi, <sup>2</sup>Anggita Nanda Ayu Kusuma, <sup>3</sup>Zahra Salsa Billa\*, <sup>4</sup>Anggi Defira Marchegiani, <sup>5</sup>Legina Ayu Puspita, <sup>6</sup>Alfin Fadhil Pradana, <sup>7</sup>Melda Fadiyah Hidayat, <sup>8</sup>Revienda Anita Fitri

<sup>1,2,4,5,6,7,8</sup>Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
Email Correspondensi: [324040674135@mhs.unesa.ac.id](mailto:324040674135@mhs.unesa.ac.id)

**Abstrak**—Kemandirian fiskal daerah menjadi prasyarat fundamental bagi pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur fisik, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Di Kota Surabaya, dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam membiayai program strategis, namun realisasinya sering kali menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan efektivitas alokasi PAD terhadap capaian pembangunan infrastruktur fisik di wilayah perkotaan Surabaya. Menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan studi kasus, data sekunder dari laporan keuangan daerah periode lima tahun terakhir diolah untuk menelaah korelasi antara pertumbuhan PAD dan progres proyek infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nominal PAD, efektivitas penyalurannya ke sektor infrastruktur masih dipengaruhi oleh inefisiensi dalam perencanaan anggaran serta ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer pusat. Temuan ini menegaskan perlunya revitalisasi strategi pemungutan pajak daerah serta penguatan sistem pengawasan anggaran guna memastikan akuntabilitas penggunaan dana. Implikasi dari studi ini menyarankan adanya reformasi manajerial keuangan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil pembangunan infrastruktur.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Infrastruktur Daerah, Otonomi Fiskal, Kota Surabaya, Efisiensi Anggaran.

**Abstract**— Regional fiscal independence is a fundamental prerequisite for governments to accelerate physical infrastructure development, particularly in densely populated urban areas. In the City of Surabaya, the dynamics of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) play a crucial role in financing strategic programs; however, its realization often faces complex structural challenges. This study aims to examine the effectiveness of PAD allocation toward the achievement of physical infrastructure development in the urban areas of Surabaya. Using a qualitative descriptive analysis approach with a case study method, secondary data from regional financial reports over the past five years were analyzed to explore the correlation between PAD growth and the progress of infrastructure projects. The results indicate that although there has been an increase in the nominal value of PAD, the effectiveness of its allocation to the infrastructure sector is still influenced by inefficiencies in budget planning as well as a relatively high dependence on central government transfer funds. These findings highlight the need for revitalizing regional tax collection strategies and strengthening budget monitoring systems to ensure accountability in the use of public funds. The implications of this study suggest the necessity of a more responsive regional financial management reform that aligns with the actual needs of infrastructure development.

**Keywords:** Local Own-Source Revenue (PAD), Regional Infrastructure, Fiscal Autonomy, City of Surabaya, Budget Efficiency.

### **1. PENDAHULUAN**

Landasan hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diselenggarakan secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerataan layanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem

transportasi, drainase, dan fasilitas publik lainnya memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan tersebut tentu memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu sumber pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keberadaan PAD menjadi indikator kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Menurut [1] Indonesia masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan PAD. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. Berkaitan dengan hal tersebut optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan PAD menjadi sangat penting agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan, khususnya dalam sektor infrastruktur.

Sejalan dengan itu, Surabaya, yang merupakan salah satu kota metropolitan terkemuka di Indonesia, mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat dalam berbagai sektor. Kenaikan jumlah penduduk, perkembangan kegiatan ekonomi, dan peningkatan mobilitas warga memerlukan tersedianya infrastruktur yang baik dan memadai. Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur agar dapat mendukung kemajuan kota dan meningkatkan layanan publik. Dalam hal ini, pengelolaan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen krusial untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Namun, tantangan dalam pengembangan wilayah di Kota Surabaya tidak hanya terkait dengan peningkatan PAD, tetapi juga tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan pendapatan tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Penelitian [2] menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang besar, namun pemanfaatannya masih memerlukan strategi yang lebih optimal agar mampu mendukung pembangunan daerah secara maksimal. Dengan ketidakefektifan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang cara penggunaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pengembangan infrastruktur daerah. Situasi ini mencerminkan adanya jurang antara potensi pendapatan daerah dengan implementasi pembangunan yang berlangsung. Pelaksanaan penggunaan PAD dalam pembangunan infrastruktur juga masih menghadapi berbagai masalah, seperti keterbatasan dalam perencanaan anggaran, variasi prioritas pembangunan, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengembangan infrastruktur di Kota Surabaya. Penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa besar peranan PAD dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta bagaimana pengelolaannya dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Untuk pemerintah daerah, hasil studi ini dapat menjadi masukan dan alat evaluasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih efisien. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan kebijakan publik, penelitian ini bisa memperluas pemahaman tentang pengelolaan keuangan regional dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, diharapkan studi ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti di masa mendatang yang ingin mengeksplorasi tema serupa tentang hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan daerah.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan data kualitatif berdasarkan temuan dalam penelitian secara deskriptif dengan sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta, karakteristik, dan hubungan fenomena yang diteliti (Furidha 2023). Metode ini bertujuan untuk mengemukakan deskripsi lengkap dan fakta mengenai suatu fenomena tanpa memanipulasi data yang ada. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam mengenai implementasi pendapatan asli daerah dalam pembangunan

infrastruktur daerah di Kota Surabaya dengan melakukan analisis berbagai dokumen atau sumber data yang berhubungan.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan topik desentralisasi fiskal dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, serta menelaah berbagai dokumen dan informasi yang tersedia pada situs resmi pemerintah maupun lembaga terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam proses ini, data dikelompokkan, ditafsirkan, dan dijelaskan untuk memahami peran PAD dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah di Kota Surabaya. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kontribusi PAD dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Analisis Kemandirian Fiskal Kota Surabaya

Kemandirian fiskal merupakan aspek penting untuk menilai kemampuan suatu daerah membiayai kebutuhannya secara mandiri baik dalam aspek pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian fiskal merupakan gambaran sejauh mana pemerintah daerah mampu bertumpu pada sumber pendapatan asli daerah dan tidak bergantung pada dana pemerintah pusat. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut juga akan naik. Untuk menganalisis kemandirian fiskal di kota Surabaya dapat dilihat dengan menganalisis kondisi sosial ekonomi, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, struktur perekonomian daerah, struktur sumber pendapatan daerah, dan pendapatan asli daerah perkapita.

#### 3.2. Kondisi Sosial Ekonomi Kota Surabaya

Kemandirian fiskal di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah merupakan kondisi sosial ekonomi daerah tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menentukan potensi penerimaan daerah melalui berbagai sektor seperti industri, jasa, serta aktivitas ekonomi lainnya. Berikut merupakan kondisi sosial ekonomi di kota Surabaya :

**Tabel.1** Kondisi Sosial dan Ekonomi Kota Surabaya

Parameter	Nilai
Luas Wilayah	326,36 km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	3.008.760 Jiwa
Tingkat Pengangguran	4,84%
Tingkat Partisipasi Kerja	70,59%
Indeks Pembangunan Manusia	85,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025.

Data tersebut menunjukkan adanya kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah Kota Surabaya serta sebagian penduduk telah terlibat dalam aktivitas ekonomi. Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Selain itu, kualitas pembangunan manusia relatif tinggi yang menunjukkan capaian tinggi dalam aspek kehidupan masyarakat di Kota Surabaya.

#### 3.3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kota Surabaya merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kemandirian fiskal daerah. APBD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

**Tabel 2.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Elemen	Nilai
Pendapatan Daerah	11.661,12 M
Belanja Daerah	12.310,98 M
<i>Pembiayaan Daerah</i>	<i>649,85 M</i>

Sumber : Kementerian Keuangan, 2025.

Berdasarkan data yang diolah dari publikasi kementerian keuangan, menunjukkan bahwa struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah kota surabaya mengalami defisit anggaran. Hal tersebut terjadi karena jumlah belanja daerah lebih besar dibandingkan jumlah pendapatan daerah. Defisit anggaran kemudian ditutup dengan pembiayaan daerah untuk menjaga keseimbangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Surabaya masih membutuhkan pembiayaan untuk menutup kebutuhannya.

### 3.4. Struktur Sumber Pendapatan Daerah

Struktur sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah dapat memperlihatkan sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri. Berikut merupakan analisis terhadap struktur sumber pendapatan daerah di kota Surabaya.

**Tabel 3.** Sumber Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Komponen	Jumlah
Pendapatan Asli Daerah	8.320,35 M
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	2.906,44 M
Pendapatan Lainnya	434,33 M

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah di Kota Surabaya di dominasi oleh pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Surabaya memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan potensi sumber pendapatan di wilayahnya sendiri. Meskipun pendapatan asli daerah mendominasi pendapatan daerah di surabaya akan tetapi dipengaruhi oleh dukungan pendapatn luar daerah. Dominasi pendapatan asli daerah menunjukkan adanya kemandirian fiskal di Kota Surabaya.

### 3.5. Pendapatan Asli Daerah per Kapita

Kemandirian fiskal dapat digambarkan dengan melihat pendapatan asli daerah per kapita. Semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah per kapita maka semakin besar potensi daerah untuk memiliki kemandirian fiskal. Berikut analisis pendapatan asli daerah per kapita di Surabaya.

**Tabel 4.** PAD per Kapita

Unsur	Nilai
Pendapatan Asli Daerah	8.320,35 M
Jumlah Penduduk	3.008.760 Jiwa
PAD per Kapita	Rp. 20.679 Juta Tahunan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025.

Nilai pendapatan asli daerah per kapita di Kota Surabaya mencapai Rp. 20.679.000,00 per tahunnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi. Hal ini mendukung daerah untuk mampu memiliki kemandirian fiskal.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kota Surabaya memiliki potensi kemandirian fiskal yang cukup kuat. Hal tersebut tercermin dari kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang dapat dikatakan baik, dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang rendah, partisipasi kerja yang tinggi, dan nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi. Selain itu, pendapatan asli daerah menunjukkan dominasi dibanding sumber pendapatan lain dalam struktur sumber pendapatan daerah, hal ini menandakan bahwa pemerintah mampu mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Meskipun masih terdapat defisit anggaran kondisi tersebut dapat ditutupi dengan pembiayaan daerah sehingga keseimbangan anggaran masih terjaga.

## **1. Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Infrastruktur**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam mengakselerasi berbagai program pembangunan di Kota Surabaya, khususnya pada sektor infrastruktur. Berdasarkan data [3], realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 menyentuh angka Rp10,034 triliun. Dari total tersebut, kontribusi PAD tercatat sebesar Rp6,114 triliun, sedangkan bagian lainnya dipenuhi melalui dana transfer pusat. Angka ini menegaskan bahwa PAD merupakan pilar utama dalam kemandirian struktur pembiayaan daerah Kota Surabaya. Pajak daerah memegang peranan sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya dengan kontribusi mencapai 60,21% dari pendapatan daerah. Pada tahun 2025, pemerintah setempat menargetkan pemasukan sebesar Rp7,307 triliun dari sektor ini (Pemerintah Kota Surabaya, 2025). Target tersebut mencakup berbagai instrumen pajak, mulai dari sektor properti seperti PBB-P2 dan BPHTB, hingga sektor komersial yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Besarnya sumbangan pajak daerah ini merefleksikan potensi fiskal signifikan yang bersumber dari pesatnya aktivitas ekonomi di Surabaya. Sebagai kota metropolitan dengan basis ekonomi yang kokoh, Surabaya memiliki keunggulan dalam memproduksi penerimaan pajak yang lebih kompetitif dibandingkan daerah lain. Fenomena ini menunjukkan efektivitas pemerintah kota dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomi lokal demi memperkuat struktur pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, peningkatan PAD merupakan indikator utama tingkat kemandirian finansial sebuah daerah. Sejalan dengan pendapat [4], derajat kemandirian ini diproyeksikan melalui rasio PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Tingginya angka rasio tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan internal tanpa ketergantungan berlebih pada pihak luar.

Pemanfaatan pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan infrastruktur tercermin dari pola alokasi PAD dalam struktur APBD. Di Kota Surabaya, penerimaan pajak daerah secara spesifik diarahkan untuk membiayai fasilitas publik, mulai dari perbaikan akses jalan dan sistem drainase hingga penguatan penerangan jalan umum. Pemerintah Kota Surabaya menekankan bahwa keberhasilan penyediaan fasilitas kota, termasuk proyek pengendalian banjir, sangat bergantung pada kontribusi pajak masyarakat sebagai sumber pendanaan utama.

Pemerintah daerah terus mengupayakan efisiensi pemungutan pajak melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pengawasan wajib pajak guna mengoptimalkan kepatuhan serta realisasi pendapatan. Sejalan dengan temuan [5], implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan terbukti meningkatkan akurasi verifikasi serta meminimalkan risiko manipulasi data. Selain itu, integrasi sistem ini memudahkan pemerintah dalam menganalisis data wajib pajak secara mendalam, termasuk mendeteksi ketidaksesuaian laporan. Pada akhirnya, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan seluruh potensi fiskal daerah terserap secara maksimal.

## **2. Infrastruktur yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat**

Untuk mendukung pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mempunyai potensi kemandirian fiskal yang tinggi dengan dominasi pendapatan asli daerah dalam struktur perekonomian daerah. Dalam upaya menjaga agar dominasi tersebut tidak hilang penting untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan sistem drainase, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur transportasi umum. Infrastruktur ini dapat memberikan dampak terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah kota Surabaya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya yaitu memberikan lingkungan hidup yang layak. Hal tersebut dapat dimulai dengan melakukan pencegahan banjir yang dapat dilakukan dengan sistem drainase. Kota Surabaya merupakan wilayah yang memiliki curah hujan cukup tinggi, namun ketika menghadapi curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang telah disediakan tidak mampu menampung seluruh volume air hujan yang ada sehingga air masih menggenang [6]. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem drainase di kota Surabaya belum berjalan secara efektif sehingga membutuhkan pembangunan dan perbaikan sistem drainase, karena dengan adanya sistem drainase yang baik akan mengurangi risiko banjir sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan drainase memiliki pengaruh terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Infrastruktur jalan juga merupakan infrastruktur yang mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terutama di Surabaya. Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai manfaat yang strategis atas pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat [7]. Infrastruktur jalan yang memadai dan berkualitas mampu meningkatkan kegiatan ekonomi & sosial, seperti distribusi barang dan jasa yang lebih efisien. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan kualitas infrastruktur jalan di Surabaya untuk memastikan kegiatan ekonomi dan sosial berjalan dengan efektif dan efisien.

Tidak hanya berfokus pada infrastruktur bersifat teknis, pemerintah kota Surabaya harus memperhatikan ruang terbuka hijau sebagai upaya pembangunan kota yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Adanya ruang terbuka hijau (RTH) memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat dan digunakan sebagai area beristirahat, olahraga, serta interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Pembangunan ruang terbuka hijau mampu meningkatkan kegiatan ekonomi untuk sebagian masyarakat dengan membuka usaha kecil-kecilan dan jasa parkir dengan menarik retribusi masyarakat yang berkunjung [8]. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) menunjukkan adanya upaya pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Sehingga penting bagi pemerintah daerah kota Surabaya untuk memperhatikan fasilitas ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat kota Surabaya.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berorientasi kepada masyarakat sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi sebuah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus responsif terhadap pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan guna menjaga keberlanjutan pembangunan kota dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Kesenjangan Antara Target PAD dan Kebutuhan Infrastruktur**

Penyediaan fasilitas publik yang representatif, seperti sistem drainase, transportasi umum, dan ruang terbuka hijau, merupakan manifestasi pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat. Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi meningkatkan taraf hidup warga, tetapi juga menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Mengingat signifikansi dampak dan besarnya kebutuhan biaya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pilar pendanaan utama yang krusial dalam mendukung kemandirian anggaran daerah di bawah kerangka desentralisasi fiskal. Dalam struktur keuangan Kota Surabaya, PAD memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total pendapatan daerah. Mengacu pada laporan APBD tahun 2024, realisasi pendapatan kota ini menyentuh angka Rp10 triliun, di mana porsi PAD mendominasi dengan nilai di atas Rp6 triliun, terutama dari sektor pajak daerah [3]. Besarnya proporsi PAD tersebut mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang kuat dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan.

Di sisi lain, kebutuhan akan infrastruktur di Surabaya terus terakselerasi sejalan dengan laju urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan intensitas ekonomi perkotaan. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memerlukan alokasi investasi yang masif untuk fasilitas publik, sistem drainase pengendali banjir, serta sarana mobilitas warga. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal masih menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan secara menyeluruh. Merujuk pada studi [4], meski tren PAD terus meningkat, kontribusinya belum cukup untuk mengover seluruh kebutuhan belanja daerah. Fenomena ini mengonfirmasi adanya diskrepansi antara realisasi pendapatan mandiri dengan besarnya tuntutan pembangunan yang harus dipenuhi.

Indikator kemandirian fiskal daerah ditentukan oleh seberapa besar porsi PAD dalam struktur penerimaan total [4], [9]. Secara teoritis, semakin besar porsi tersebut, semakin mandiri sebuah daerah dalam mengeksekusi pembangunan. Namun kenyataannya, banyak daerah yang belum maksimal dalam menggali pendapatan asli sehingga dukungan dana pusat tetap diperlukan. Surabaya pun tidak luput dari dinamika ini; pesatnya pembangunan infrastruktur membuat pemerintah kota harus bekerja keras menyeimbangkan neraca anggaran. Guna mengatasi kesenjangan ini, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan PAD dan mencari terobosan pembiayaan di luar skema konvensional agar pembangunan tidak terhambat.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya, dapat dirangkum bahwa potensi fiskal daerah yang tangguh melalui PAD membuka peluang luas guna mempercepat kemajuan infrastruktur. Akan tetapi, hambatan pokok yang muncul adalah ketidakselarasan antara kebutuhan infrastruktur yang kian membengkak disebabkan pertumbuhan populasi dan

urbanisasi dengan keterbatasan sumber pendanaan yang ada. Walaupun telah diterapkan digitalisasi serta peningkatan efisiensi pengelolaan pajak, tetap dibutuhkan terobosan dalam tata kelola keuangan daerah beserta penyempurnaan perencanaan dan pengawasan anggaran agar dana tersedia dapat dialokasikan dengan maksimal. Di samping itu, pembangunan infrastruktur perlu lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, khususnya pada pengelolaan drainase dan ruang terbuka hijau, demi menunjang keberlanjutan serta peningkatan kesejahteraan penduduk Surabaya. Strategi yang lebih komprehensif dan fleksibel dalam pengelolaan PAD serta pembangunan infrastruktur merupakan faktor penentu untuk merealisasikan pembangunan daerah yang lestari dan mandiri secara fiskal.

## REFERENSI

- [1] I. Takaria and L. Ardini, "Optimalisasi pendapatan asli daerah terhadap pembangunan Kota Surabaya." 2017.
- [2] A. Rahman and D. Sari, "Strategi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya melalui analisis SWOT," *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 2, no. 1, pp. 45–56, 2026.
- [3] B. P. S. K. Surabaya, "Jumlah penduduk Surabaya menurut jenis kelamin dan kelompok umur," *Diakses*, XXXX, [Online]. Available: <https://surabayakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM2IzI=/jumlah-penduduk-surabaya-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur.html>.
- [4] Z. P. Maharani and Haryanto, "Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2018–2023)," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 14, no. 3, pp. 1–12, 2025.
- [5] Y. Daniel, T. N. Astari, M. A. Putri, H. Bilqisti, and A. Ariesmansyah, "Transformasi digital dinas perpajakan Kota Bandung: Meningkatkan tata kelola, kebijakan publik, dan keuangan daerah melalui digitalisasi administrasi publik," *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, vol. 2, no. 1, pp. 35–42, 2025.
- [6] D. Zebua, P. Prayoga, and P. C. F. E. Waruwu, "Evaluasi dan desain pengembangan infrastruktur pengaliran drainase di wilayah Ngagel Tirta Kota Surabaya," *Jurnal Penelitian Jalan dan Jembatan*, vol. 3, no. 1, pp. 26–32, 2023, doi: 10.59900/ptrkjj.v3i1.134.
- [7] F. A. Silvy, A. Sukristyanto, and M. R. Basyar, "Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalur Luar Lingkar Barat di Kota Surabaya," vol. 4, no. 05. pp. 166–178, 2024. doi: 10.69957/paob.v4i05.1644.
- [8] E. Hidayat and E. S. Partama, "Dampak Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kasus Taman Cahaya Kota Surabaya," *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, vol. 2, no. 2, pp. 52–66, 2021, doi: 10.33822/jpds.v2i2.5899.
- [9] Y. Jhon and W. Wahyuningsih, "Upaya Guru Dalam Mengatasi Rendahnya Minat Baca Siswa Di Perpustakaan Mts Muhammadiyah Al-Fatah Nangahale," *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, pp. 13–18, 2023.